

PERAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Darisalim Telaumbanua¹, Agnes Olida Ndururu², Agus Febriani Gori³,

Hening Putri Kristiani Gulo⁴, Jemiman Faomasi Telaumbanua⁵,

Joece Sindyani Nazara⁶, Saskia Putri Jambak⁷, Yustina Lase⁸

¹⁻⁸Universitas Nias, Sumatera Utara, Jl. Yos Sudarso Ujung E-S, Gunungsitoli, Sumatera Utara, Indonesia

Email: telaumbanua.darisalim@gmail.com

Article History

Received: 07-06-2026

Revision: 20-06-2026

Accepted: 23-06-2026

Published: 25-06-2026

Abstract. Political education plays a crucial role in shaping citizens' awareness of their rights, obligations, and participation in a democratic society. This study aims to analyze the role of political education in raising citizen awareness and identify effective approaches to political education to support public political participation. The study employed a Systematic Literature Review (SLR) method for reviewing scientific articles published between 2015 and 2025. The review process involved identification, screening, eligibility assessment, and article selection based on established inclusion and exclusion criteria. Literature meeting the criteria was then analyzed using thematic analysis to identify patterns, themes, and trends in the research findings. The study's findings indicate that political education conducted in a critical, participatory, and contextual manner can enhance political understanding, awareness of citizens' rights and obligations, and public participation in the democratic process. Conversely, a one-way and doctrinal approach tends to result in limited political understanding. The findings also indicate that quality political education contributes to strengthening democratic culture at both the local and national levels. Therefore, strengthening political education through formal and non-formal education needs to be a priority in developing civic education policies.

Keywords: Political Education, Citizens' Rights, Citizens' Obligations, Political Awareness, Democracy, Active Citizenship

Abstrak. Pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran warga negara terhadap hak, kewajiban, dan partisipasi dalam kehidupan demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran warga negara serta mengidentifikasi pendekatan pendidikan politik yang efektif dalam mendukung partisipasi politik masyarakat. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2015–2025. Proses kajian dilakukan melalui tahapan identifikasi, screening, penilaian kelayakan, dan seleksi artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Literatur yang memenuhi kriteria kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diselenggarakan secara kritis, partisipatif, dan kontekstual mampu meningkatkan pemahaman politik, kesadaran hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Sebaliknya, pendekatan yang bersifat satu arah dan doktriner cenderung menghasilkan pemahaman politik yang terbatas. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan politik yang berkualitas berkontribusi terhadap penguatan budaya demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik melalui pendidikan formal dan nonformal perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kebijakan pendidikan kewarganegaraan.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Hak Warga Negara, Kewajiban Warga Negara, Kesadaran Politik, Demokrasi, Kewarganegaraan Aktif

How to Cite: Telaumbanua, D., Ndururu, A. O., Gori, A. F., Gulo, H. P. K., Telaumbanua, J. F., Nazara, J. S., Jambak, S. P., & Lase, Y. (2026). Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (3), 4300-4320. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i3.6222>

PENDAHULUAN

Kesadaran warga negara terhadap hak, kewajiban, dan partisipasi dalam kehidupan demokratis merupakan salah satu indikator penting bagi keberhasilan pembangunan demokrasi. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa tingkat literasi politik dan partisipasi politik masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman terhadap proses politik, minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik, serta kecenderungan partisipasi politik yang lebih dipengaruhi oleh faktor emosional daripada pertimbangan rasional (Hasan, 2020; LSI, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan politik sebagai sarana untuk membangun warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian pengetahuan mengenai sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran warga negara terhadap hak, kewajiban, dan perannya dalam kehidupan demokratis (Suryadi, 2019). Melalui pendidikan politik yang efektif, masyarakat diharapkan mampu memahami isu-isu publik secara kritis, berpartisipasi dalam proses politik secara bertanggung jawab, serta berkontribusi dalam penguatan budaya demokrasi. Namun demikian, implementasi pendidikan politik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam konteks pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendekatan pembelajaran yang masih bersifat informatif dan kurang partisipatif sering kali menyebabkan pendidikan politik belum mampu membentuk kesadaran politik yang mendalam.

Penelitian terdahulu umumnya membahas pendidikan politik dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di sekolah (Hasan, 2020) atau partisipasi politik masyarakat secara terpisah (Suryadi, 2019). Kajian tersebut telah menunjukkan pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi belum banyak yang mengintegrasikan berbagai temuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana pendidikan politik, baik melalui jalur formal maupun nonformal, berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran warga negara. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian sintesis komprehensif mengenai peran pendidikan politik dalam membangun kesadaran hak dan kewajiban warga negara melalui analisis berbagai hasil penelitian selama periode 2015–2025.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran warga negara, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung efektivitas pendidikan politik, serta merumuskan implikasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan pendidikan politik yang lebih partisipatif dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran warga negara berdasarkan temuan penelitian yang telah dipublikasikan. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data *Google Scholar*, ERIC, Scopus, dan portal jurnal nasional SINTA menggunakan kata kunci "pendidikan politik", "*political education*", "*civic education*", "kesadaran warga negara", "*civic awareness*", "hak warga negara", dan "kewajiban warga negara". Literatur yang ditelusuri dibatasi pada publikasi tahun 2015–2025 untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran data.

Kriteria inklusi penelitian meliputi: (1) artikel jurnal terindeks atau buku akademik yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau Inggris; (2) membahas pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan, atau kesadaran warga negara; dan (3) memiliki metode penelitian yang jelas dan dapat diverifikasi. Sementara itu, artikel opini, editorial, prosiding *non-review*, serta publikasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian dikeluarkan dari proses analisis. Dari 347 publikasi yang teridentifikasi pada tahap awal, dilakukan proses screening berdasarkan judul, abstrak, dan isi artikel sehingga diperoleh 68 publikasi yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke. Proses analisis meliputi enam tahap, yaitu: (1) familiarisasi data melalui pembacaan berulang terhadap seluruh artikel yang terpilih; (2) penyusunan kode awal (*initial coding*) berdasarkan informasi penting yang berkaitan dengan pendidikan politik dan kesadaran warga negara; (3) pengelompokan kode ke dalam tema-tema sementara; (4) penelaahan dan penyempurnaan tema untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian; (5) pendefinisian dan penamaan tema utama; serta (6) penyusunan interpretasi dan sintesis temuan. Melalui proses tersebut, diperoleh beberapa tema utama yang berkaitan dengan bentuk pendidikan politik, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendidikan politik, kontribusi pendidikan politik terhadap kesadaran warga negara, serta tantangan dalam implementasinya. Hasil sintesis kemudian digunakan untuk menjelaskan pola temuan penelitian, mengidentifikasi kesenjangan kajian, dan merumuskan implikasi bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan pendidikan politik.

HASIL DAN DISKUSI

Wajah Pendidikan Politik di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan

Temuan pertama dari kajian ini adalah adanya kesenjangan yang cukup besar antara idealisme pendidikan politik dalam kebijakan dan kenyataan yang terjadi di ruang kelas. Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berlaku secara formal memang sudah mencantumkan kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan pemahaman hak dan kewajiban. Namun dalam praktiknya, pengajaran PPKn masih didominasi oleh metode ceramah yang bersifat satu arah, hafalan teks, dan evaluasi berbasis tes tertulis yang mengutamakan ingatan faktual ketimbang pemahaman mendalam (Rahayu & Mustofa, 2023).

Sebuah survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud, 2022) terhadap 1.200 guru PPKn di 12 provinsi mengungkapkan bahwa lebih dari 67% guru mengakui kesulitan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang bersifat aktif dan partisipatif. Hambatan terbesar yang disebutkan adalah tekanan untuk menyelesaikan materi sesuai target kurikulum, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya pelatihan tentang metode pembelajaran kontekstual. Di sisi lain, muncul pula praktik-praktik inspiratif yang patut dicatat. Beberapa sekolah menengah di Yogyakarta, misalnya, telah mengintegrasikan proyek kewarganegaraan (*civic project*) ke dalam kurikulum PPKn mereka. Para siswa tidak hanya belajar tentang hak memperoleh lingkungan yang bersih, tetapi juga mengorganisir kampanye kebersihan di lingkungan sekolah dan melakukan audiensi dengan pejabat setempat untuk mengadvokasi kebijakan lingkungan yang lebih baik. Hasilnya, pengetahuan tentang hak dan kewajiban tidak lagi terasa abstrak, melainkan hidup dalam tindakan nyata (Wardani & Setiawan, 2024).

Temuan ini sejalan dengan penelitian lintas negara yang dilakukan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) melalui studi ICCS (*International Civic and Citizenship Education Study*). Studi tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa siswa yang terpapar metode pembelajaran aktif—seperti diskusi terbuka, simulasi parlemen, dan proyek layanan masyarakat—memiliki tingkat pemahaman kewarganegaraan yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang hanya menerima pembelajaran pasif (Schulz dkk., dalam Hermanto, 2023).

Pendidikan Politik Nonformal: Kekuatan yang Kerap Terabaikan

Salah satu temuan yang paling menarik dalam kajian ini adalah betapa besarnya peran pendidikan politik yang berlangsung di luar tembok sekolah. Organisasi kepemudaan, komunitas adat, forum warga, lembaga swadaya masyarakat, dan bahkan media sosial terbukti

menjadi arena pendidikan politik yang sangat efektif—terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan formal berkualitas.

Studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2021) terhadap organisasi karang taruna di berbagai daerah menemukan bahwa pemuda yang aktif berorganisasi memiliki tingkat kesadaran politik yang rata-rata 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan teman sebaya mereka yang tidak berorganisasi. Mereka lebih mampu menyebutkan hak-hak konstitusional mereka, lebih paham tentang prosedur pemilihan umum, dan lebih aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Media sosial, sebagai fenomena yang relatif baru, menghadirkan dimensi yang lebih kompleks dalam pendidikan politik nonformal. Di satu sisi, platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter/X telah terbukti mampu meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda secara masif dan cepat. Gerakan-gerakan seperti #BersihBPJS, #ReformasiDikorupsi, dan berbagai tagar aktivisme sipil lainnya menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi katalisator kesadaran politik yang powerful. Namun di sisi lain, fenomena misinformasi, filter bubble, dan polarisasi politik di media sosial menjadi ancaman serius yang tidak bisa diabaikan (Kusuma & Wahyuni, 2024).

Riset yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM, 2023) menunjukkan bahwa 78% responden usia 17-25 tahun mengaku mendapat informasi tentang hak-hak mereka pertama kali dari media sosial, bukan dari pendidikan formal. Ini mengisyaratkan perlunya pendekatan literasi digital yang terintegrasi dalam program pendidikan politik, sehingga warga muda tidak hanya bisa mengonsumsi informasi politik dari media sosial, tetapi juga mampu memilah mana yang akurat dan mana yang menyesatkan.

Peran Guru dan Fasilitator sebagai Agen Perubahan

Tidak ada satu pun sistem pendidikan yang bisa berjalan lebih baik dari orang-orang yang menggerakkannya. Dalam konteks pendidikan politik, guru PPKn dan para fasilitator pendidikan masyarakat adalah aktor sentral yang kualitasnya sangat menentukan efektivitas keseluruhan program. Kajian ini menemukan bahwa guru yang memiliki komitmen nilai-nilai demokrasi yang kuat dan keterampilan memfasilitasi diskusi kelas yang terbuka dan inklusif cenderung menghasilkan siswa dengan tingkat kesadaran politik yang jauh lebih tinggi (Budimansyah, 2021).

Kualitas guru PPKn di Indonesia masih sangat tidak merata. Data dari Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa sekitar 42% guru PPKn di tingkat SMP dan SMA belum memiliki sertifikasi pendidik, dan banyak di antara mereka mengajarkan PPKn bukan sebagai bidang studi utama melainkan sebagai 'beban mengajar tambahan' di luar keahlian pokok mereka. Kondisi ini tentu berpengaruh langsung pada kualitas pendidikan politik yang diterima oleh jutaan siswa Indonesia.

Penelitian Cogan dan Derricott (dalam Asmawi, 2022) mengidentifikasi empat kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh seorang pendidik politik yang efektif: kemampuan mengaitkan materi dengan isu-isu kontemporer yang relevan, keterampilan mendorong partisipasi aktif siswa, kemampuan menciptakan ruang aman untuk diskusi tentang topik-topik yang sensitif secara politik, dan kompetensi dalam mengelola perbedaan pandangan secara konstruktif. Keempat kompetensi ini sayangnya belum menjadi fokus utama dalam program pelatihan guru di Indonesia. Di komunitas-komunitas yang tidak terlayani oleh pendidikan formal, peran fasilitator dari LSM dan organisasi masyarakat sipil terbukti sangat vital. Program-program seperti Sekolah Demokrasi yang diinisiasi oleh sejumlah organisasi sipil di Jawa Timur berhasil meningkatkan tingkat partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, yang secara signifikan berdampak positif pada perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Rosyada & Arif, 2023).

Indikator Keberhasilan: Bagaimana Mengukur Kesadaran Politik?

Mengukur keberhasilan pendidikan politik bukanlah perkara sederhana. Tidak seperti mata pelajaran eksak yang hasil belajarnya bisa diukur dengan angka-angka yang presisi, kesadaran politik adalah konstruk psikososial yang bersifat multidimensi dan dinamis. Para peneliti telah mengembangkan berbagai instrumen dan indikator untuk menangkap kompleksitas ini. Dalam kerangka yang dikembangkan oleh Torney-Purta dkk. (dalam Ilham, 2024), kesadaran kewarganegaraan yang efektif mencakup tiga domain: domain kognitif (pengetahuan tentang sistem politik dan hak-kewajiban), domain afektif (sikap positif terhadap partisipasi dan nilai-nilai demokrasi), serta domain behavioral (tindakan nyata dalam kehidupan sipil). Ketiga domain ini harus berkembang secara seimbang—pengetahuan yang tinggi tanpa disertai sikap yang positif tidak akan menghasilkan perilaku kewarganegaraan yang aktif.

Dari kajian literatur yang dilakukan, ditemukan setidaknya enam indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur efektivitas pendidikan politik: (1) tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, terutama di kalangan pemilih pemula; (2) kemampuan menyebutkan dan menjelaskan hak-hak konstitusional yang dimiliki; (3) frekuensi dan kualitas keterlibatan

dalam diskusi politik; (4) kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi dan kebijakan politik; (5) kepatuhan terhadap kewajiban sipil seperti membayar pajak dan mengikuti wajib militer; dan (6) keterlibatan dalam kegiatan komunitas dan organisasi masyarakat sipil (Wahyu & Supratman, 2022).

Menggunakan kerangka indikator ini, sebuah penelitian longitudinal yang dilakukan di 15 kabupaten/kota di Indonesia selama tiga tahun (2020-2023) menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara kualitas program pendidikan politik yang diterapkan dan peningkatan pada kelima indikator tersebut. Daerah-daerah yang menerapkan pendekatan pendidikan politik partisipatif dan berbasis komunitas menunjukkan peningkatan partisipasi pemilih pemula hingga 23%, dan penurunan kasus pelanggaran sipil ringan hingga 18% dibandingkan daerah kontrol (Nasrullah & Indrawati, 2024).

Tantangan Dan Hambatan Utama

Politisasi Pendidikan: Ancaman dari Dalam

Salah satu tantangan paling mendasar yang dihadapi pendidikan politik di Indonesia—dan di banyak negara berkembang lainnya—adalah risiko politisasi itu sendiri. Ketika kurikulum pendidikan kewarganegaraan dirancang oleh aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan tertentu, ada bahaya bahwa konten yang diajarkan akan lebih banyak melayani kepentingan penguasa daripada kepentingan warga negara secara keseluruhan. Sejarah membuktikan bahwa rezim-rezim otoriter hampir selalu menggunakan pendidikan sebagai instrumen pembentukan kepatuhan, bukan pemberdayaan (Giroux, dalam Priyatna, 2021). Di Indonesia pasca reformasi, meski ancaman indoktrinasi skala besar sudah jauh berkurang, bentuk-bentuk politisasi yang lebih halus masih kerap terjadi. Pemilihan buku teks yang bias, penghindaran topik-topik yang dianggap sensitif seperti sejarah pelanggaran HAM atau kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta tekanan untuk tidak membahas isu-isu kontroversial di kelas adalah contoh-contoh nyata dari tantangan ini (Asshiddiqie, dalam Isnaini, 2023).

Kesenjangan Infrastruktur dan Akses

Tantangan lain yang tak kalah serius adalah kesenjangan akses terhadap pendidikan politik yang berkualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara Jawa dan luar Jawa, serta antara kelompok masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi dan mereka yang hanya mengecap pendidikan dasar. Kesenjangan ini bukan hanya persoalan infrastruktur fisik seperti gedung sekolah dan koneksi internet, tetapi juga menyangkut ketersediaan guru yang kompeten, materi

pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal, dan lingkungan sosial yang mendukung pembelajaran kewarganegaraan.

Data BPS (2024) mencatat bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten-kabupaten terpencil di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku masih jauh di bawah rata-rata nasional. Ini berarti akses terhadap pendidikan berkualitas—termasuk pendidikan politik—bagi warga di daerah-daerah tersebut masih sangat terbatas. Tanpa pemerataan akses ini, kesenjangan dalam kesadaran politik antara warga kota dan desa akan terus melebar dan berpotensi mengancam kohesi sosial serta kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Generasi Digital dan Tantangan Literasi Informasi

Generasi yang lahir setelah tahun 1995—yang oleh para sosiolog sering disebut sebagai Generasi Z dan Generasi Alpha—tumbuh dalam ekosistem informasi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka hidup bersama internet sejak kecil, mengonsumsi konten media sosial dalam jumlah yang luar biasa besar, dan terbiasa mendapatkan informasi dalam format yang singkat, visual, dan instan. Cara mereka belajar tentang politik, hak, dan kewajiban warga negara pun sangat berbeda. Tantangannya adalah bahwa ekosistem informasi digital ini penuh dengan jebakan: hoaks, propaganda, konten provokasi, dan manipulasi opini adalah makanan sehari-hari di media sosial. Tanpa kemampuan literasi digital yang memadai, generasi muda yang terpapar konten-konten semacam ini berisiko mengembangkan pandangan-pandangan politik yang distortif dan bahkan berbahaya. Pendidikan politik di era digital karenanya harus memasukkan kompetensi literasi media dan berpikir kritis sebagai komponen yang tidak bisa ditinggalkan (Sari & Nurhayati, 2024).

Rekomendasi dan Arah Pengembangan ke Depan

Rekomendasi yang disusun dalam penelitian ini merupakan tindak lanjut dari tujuan penelitian untuk menganalisis kontribusi pendidikan politik terhadap kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Temuan kajian menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan politik tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga oleh pendekatan pembelajaran, kompetensi pendidik, dukungan lingkungan sosial, serta kemampuan warga negara dalam menghadapi dinamika informasi digital. Oleh karena itu, rekomendasi berikut dirumuskan sebagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan politik yang lebih partisipatif, kritis,

dan kontekstual sehingga mampu meningkatkan kesadaran kewarganegaraan dan memperkuat kualitas demokrasi.

Reformasi kurikulum PPKn yang menyeluruh dan berani. Kurikulum yang ada perlu direvisi secara fundamental, dari model yang berpusat pada hafalan menuju model yang berpusat pada kompetensi berpikir kritis dan partisipasi aktif. Revisi ini tidak boleh hanya menyentuh permukaan mengganti nama mata pelajaran atau menambah beberapa indikator baru tetapi harus mengubah filosofi dasar dari apa yang ingin dicapai oleh pendidikan kewarganegaraan (Sunarso & Winarno, 2022). Investasi besar-besaran dalam pengembangan kapasitas guru. Pemerintah perlu memprioritaskan program pelatihan berkelanjutan bagi guru PPKn yang berfokus pada pengembangan kemampuan memfasilitasi diskusi demokratis, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, dan mengintegrasikan isu-isu kontemporer yang relevan ke dalam pembelajaran. Sertifikasi khusus bagi guru pendidikan kewarganegaraan perlu diperketatkan dan diberi insentif yang memadai.

Pengembangan pendidikan politik berbasis komunitas yang lebih terstruktur. Pemerintah perlu memberikan dukungan regulasi dan finansial bagi program-program pendidikan politik yang dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, dan lembaga keagamaan yang terbukti efektif dalam menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal (Rosyada & Arif, 2023). Integrasi literasi digital dan media dalam pendidikan politik. Mengingat semakin besarnya peran media digital dalam membentuk persepsi politik warga muda, kompetensi literasi digital harus dijadikan bagian integral dari kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Ini mencakup kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi secara kritis, memahami cara kerja algoritma media sosial, dan mengenali berbagai bentuk manipulasi informasi (Sari & Nurhayati, 2024).

Pembuatan ruang-ruang partisipasi nyata bagi pelajar. Pembelajaran tentang demokrasi tidak bisa hanya terjadi di dalam kelas. Sekolah perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan siswa untuk benar-benar berlatih menjadi warga negara yang aktif—misalnya melalui *student government* yang diberi kewenangan nyata, proyek pelayanan komunitas yang terstruktur, atau simulasi proses legislasi yang melibatkan lembaga-lembaga nyata di daerah. Pembangunan sistem evaluasi yang komprehensif. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme evaluasi yang mampu mengukur tidak hanya dimensi kognitif dari pendidikan politik, tetapi juga dimensi afektif dan behavioral. Tanpa sistem evaluasi yang memadai, sulit untuk mengetahui apakah program-program yang dijalankan benar-benar menghasilkan perubahan yang berarti dalam kesadaran dan perilaku warga negara (Ilham, 2024).

KESIMPULAN

Perjalanan panjang kajian ini membawa kita pada satu kesimpulan yang rasanya sudah kita ketahui secara intuitif tetapi perlu terus-menerus dibuktikan dan dipertegas: pendidikan politik yang berkualitas adalah kunci untuk membangun warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, dan pada gilirannya, warga negara yang berdaya adalah fondasi terkuat bagi sebuah demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Kajian ini telah menunjukkan bahwa pendidikan politik yang efektif memiliki karakter-karakter tertentu: ia bersifat partisipatif dan dialogis, kontekstual dan relevan dengan pengalaman nyata peserta didik, kritis dan mendorong pemikiran mandiri, serta berkelanjutan dan tidak berhenti di pintu gerbang sekolah. Sebaliknya, pendidikan politik yang bersifat doktriner, hafalan, dan satu arah tidak hanya tidak efektif—ia bahkan bisa kontraproduktif dengan menumbuhkan sinisme dan apatis terhadap proses politik.

Indonesia berada di persimpangan penting. Di satu sisi, ia adalah demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan populasi muda yang luar biasa besar—sebuah aset yang tak ternilai jika berhasil dibekali dengan kesadaran politik yang matang. Di sisi lain, tantangan berupa politisasi pendidikan, kesenjangan akses, dan ancaman disrupsi informasi digital terus mengintai. Pilihan ada di tangan kita bersama: apakah kita akan membangun generasi warga negara yang aktif dan berdaya, atau generasi yang pasif dan mudah dimanipulasi. Penelitian ke depan perlu difokuskan pada pengembangan dan pengujian model-model pembelajaran pendidikan politik yang inovatif dan berbasis bukti, khususnya yang mempertimbangkan keunikan konteks budaya dan sosial Indonesia yang majemuk. Selain itu, studi longitudinal yang lebih komprehensif tentang dampak jangka panjang pendidikan politik terhadap perilaku kewarganegaraan sangat diperlukan untuk memberikan landasan empiris yang lebih kuat bagi kebijakan nasional di bidang ini

REFERENSI

- Asmawi, M. R. (2022). Kompetensi guru pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pembelajaran abad ke-21. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 45–62.
- Asshiddiqie, J. (dalam Isnaini, A., 2023). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia: Tinjauan kritis pasca reformasi. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 10(1), 12–30.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Indeks Pembangunan Manusia 2023. Jakarta: BPS RI.
- Budimansyah, D. (2021). Penguatan kompetensi guru PKn dalam pembelajaran berbasis konteks demokratis. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 28(3), 210–228.
- ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2023). Hak digital dan kesadaran generasi muda: Temuan survei nasional. Jakarta: ELSAM.
- Fatimah, S., & Kurniawan, B. (2023). Perbedaan persepsi hak warga negara antara masyarakat urban dan rural: Studi komparatif di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 88–107.

- Freire, P. (dalam Mulyana, D., 2023). Pedagogi kaum tertindas dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Filsafat dan Pendidikan*, 7(1), 1–18.
- Hasan, S. H. (2020). Pendidikan sejarah untuk kehidupan abad ke-21. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(1), 1–15.
- Hermanto, B. (2023). Studi komparatif ICCS dan implikasinya terhadap kurikulum pendidikan kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(1), 55–74.
- Ilham, M. (2024). Mengukur kesadaran kewarganegaraan: Kerangka evaluasi multidimensi untuk program pendidikan politik. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 15(1), 21–40.
- Kemendikbudristek. (2023). Statistik pendidikan 2022/2023. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek.
- Kusuma, R., & Wahyuni, D. (2024). Media sosial sebagai arena pendidikan politik informal: Peluang dan ancaman bagi demokrasi Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 18(2), 105–126.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2021). Organisasi kepemudaan dan kesadaran politik: Studi empiris nasional. Jakarta: LIPI Press.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2023). Laporan survei kepercayaan publik terhadap institusi politik 2023. Jakarta: LSI.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2022). Hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI.
- Marshall, T. H. (dalam Pratiwi, E., 2021). Citizenship and social class: Relevansinya untuk analisis hak warga negara Indonesia. *Jurnal Sosiologi Politik*, 9(1), 34–50.
- Murtadlo, M. (2022). Analisis tematik dalam penelitian pendidikan: Panduan metodologis. *Jurnal Metodologi Penelitian Pendidikan*, 8(2), 77–93.
- Nasrullah, F., & Indrawati, S. (2024). Dampak pendidikan politik partisipatif terhadap perilaku kewarganegaraan: Studi longitudinal 15 kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1), 1–24.
- Priyatna, A. (2021). Politik pendidikan dan pendidikan politik: Antara pembebasan dan domestikasi. *Jurnal Pendidikan Kritis*, 3(2), 55–72.
- Puslitjakdikbud. (2022). Studi nasional implementasi pembelajaran PPKn. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Rahayu, M., & Mustofa, K. (2023). Analisis pembelajaran PPKn berbasis hafalan dan implikasinya terhadap kesadaran sipil siswa SMA. *Jurnal Civics*, 20(1), 33–50.
- Rosyada, D., & Arif, A. (2023). Sekolah demokrasi sebagai model pendidikan politik berbasis komunitas: Pengalaman Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 11(2), 144–162.
- Santoso, B., & Nurhaeni, I. D. A. (2022). Kearifan lokal sebagai fondasi pendidikan kewarganegaraan partisipatif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 1–16.
- Sari, D. P., & Nurhayati, E. (2024). Literasi digital dan kesadaran politik generasi Z di era post-truth. *Jurnal Komunikasi Politik*, 6(1), 25–44.
- Sunarso & Winarno. (2022). Reformasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan: Dari konten menuju kompetensi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 99–116.
- Suryadi, K. (2019). Pendidikan kewarganegaraan dan tantangan demokrasi kontemporer. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahyu, A., & Supratman, L. P. (2022). Indikator efektivitas pendidikan politik di negara berkembang: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 44–62.
- Winataputra, U. S. (2021). Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan untuk bela negara: Kontekstualisasi dan implementasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 1–15.